

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PENINGKATAN EKONOMI *KELUARGA***
**(Telaah Empiris Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka)**

Oleh: Wulpiah

PSGA STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Email: ulfii2015@gmail.com

Abstract

Women empowerment in the field of economy in particular, should be maximized necessary empowerment program for women community both in home industry. The presence of local food products that exist at Desa Kemuja “Pembuatan Beras Aruk” should be followed by the availability of basic ingredients of how high quality cassava. Furthermore, in terms of processing, packaging and branding, and marketing should be more improved in order to really be a support and help the family economy. One type of business currently KPRL “Pembuatan Beras Aruk” in order to foster the public interest in creating employment for all parties specifically for the improvement and empowerment of women's economy. The existence of this business should be a model of tiered training and more optimized, so that the reliable and professional human resources in turn the production level the better.

Keywords: *Women Empowerment, Economy, Home industry*

A. PENDAHULUAN

Sudah tak terbantahkan, jika keterlibatan perempuan di Indonesia pada ranah bisnis atau wirausaha telah ada sejak lama. Sejarah menunjukkan jika perempuan telah terjun dalam dunia perdagangan, misalnya perempuan di Solo, Yogyakarta telah membantu ekonomi keluarga bahkan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dengan usaha batik yang mereka kelola. Demikian halnya di Palembang, Padang, Lampung, dan Ujung Pandang, perempuan-perempuan sukses dalam mengelola *home industry* berupa kain songket yang terkenal dengan berbagai jenis kerajinan tangan ataupun makanan sebagai ciri khas suatu daerah yang merupakan hasil karya perempuan.

Fakta memperlihatkan sesungguhnya para perempuan sangat potensial untuk melakukan berbagai kegiatan produktif yang menghasilkan dan dapat membantu ekonomi keluarga, dan lebih luas lagi ekonomi nasional, apalagi potensi tersebut menyebar di berbagai bidang maupun sektor. Dengan potensi tersebut perempuan berperan aktif dalam proses *recovery* ekonomi yang masih diselimuti berbagai permasalahan, maka potensi perempuan perlu ditingkatkan. Namun di sisi lain upaya untuk mengidentifikasi faktor

penyebab para perempuan sulit maju baik sebagai perempuan bekerja khususnya sebagai wirausahawan (pelaku usaha) perlu dilakukan sehingga ditemukan solusi terkait pola pemberdayaan perempuan pekerja.

Menurut Cakrawala Cinta (Ide Usaha Kecil dan Madya, 1994), terdapat perbedaan penting yang menentukan jiwa kewirausahaan antara laki-laki dan perempuan, mayoritas perempuan sulit untuk maju karena :

- 1). Perempuan kurang diajar bersaing, mereka tidak dikembangkan dengan semangat persaingan yang baik dalam dunia usaha. Sejak kecil kurang dilibatkan dan terlibat, kurang terlatih dalam *team work*, misalnya dalam *team work sport*. Mereka kurang bertanding, malahan cenderung menghindari konfrontasi, karena konfrontasi bukan sifat lemah lembutnya perempuan.
- 2). Perempuan terlalu melihat detail perkara-perkara kecil, mereka terlalu berkepentingan atas hal-hal yang detail dari masalah, sehingga tidak terbiasa melihat kedudukan dari perspektif keseluruhannya, yang berdampak melepaskan konteks global perusahaan, selanjutnya akan mengganggu pengembangan jiwa kepemimpinannya.
- 3). Perempuan cenderung mengedepankan faktor emosional dalam situasi yang tidak tepat, sehingga banyak perempuan menghabiskan waktu memikirkan ”apa kata orang nanti” ketika seharusnya dia berpikir secara profesional untuk menyelesaikan tugasnya, sering menanam ”perasaan tidak enak” secara berkepanjangan, sering emosional dan sentimental apabila dikritik tentang pekerjaannya, sikap maupun penampilannya.
- 4). Perempuan kurang berani mengambil risiko, berkaitan dengan sering memikirkan ”apa kata orang nanti”, perempuan cenderung melakukan tugas-tugas secara aman dan *average* (rata-rata kebiasaan, sehingga pimpinan menganggap mereka sebagai pegawai biasa-biasa saja yang rata-rata, tidak akan menuntut jenjang promosinya).
- 5). Perempuan kurang cukup agresif, karena sifat agresif tidak searah dengan pendidikan yang diterimanya selama ini, bahwa perempuan harus feminim, jangan agresif, sehingga tidak ”berani ” mengungkapkan perasaan dan idenya secara tegas (asertif), dan tidak ”berani ” mengatakan ”tidak” atas pendapat dan sikap teman kerjanya yang diketahuinya salah.

- 6). Mereka lebih senang bereaksi daripada mengambil inisiatif, mereka terlalu riuh untuk menonjolkan kelebihan pendapat dan kepemimpinannya dan lebih suka jalur yang telah ada.
- 7). Perempuan lebih berorientasi pada tugas dari pada tujuan, berpikir besar pada tujuan dan sasaran, terkalahkan oleh kebiasaannya dalam pekerjaan rutin dan yang detail.

Namun persoalan penting yang perlu diperhatikan dalam sebuah program pemberdayaan dan pembangunan adalah hadirnya kesetaraan gender. Perempuan terkadang dikesampingkan peran dan keterlibatannya dalam sebuah program pemberdayaan dan pembangunan dengan anggapan perempuan tidak memiliki kemampuan yang cukup dibandingkan dengan laki-laki. Adanya *stereotype* atau pelabelan yang mengakibatkan ketidakadilan pada perempuan. Menurut Handayani dan Sugiarti (2008) akibat pelabelan ini banyak tindakan-tindakan yang seolah-olah merupakan kodrat; perempuan identik dengan *domestical area* dan tentu di rumah, maka peluang perempuan untuk bekerja di luar rumah sangat terbatas. Lebih lanjut Hubeis (2010) menyatakan bahwa perempuan diminta berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai kodrati perempuan tetap dituntut dilakukan sendirian oleh perempuan. Peran ganda (*double burden*) seolah-olah hanya milik perempuan. Hal ini mengakibatkan perempuan ‘rumahan’ menjadi risau karena menganggap dirinya tidak dapat berpartisipasi dalam konteks yang lebih luas.

Adanya isu *gender mainstreaming* menempatkan perempuan pada posisi yang tidak lagi dalam situasi ketidakadilan, salah satunya dalam peran dan partisipasinya pada program pemberdayaan. Menurut pendapat Hubeis (2010) bahwa pemahaman gender dalam konteks *Gender and Development* (GAD) adalah pencapaian kesetaraan dan kesederajatan, keadilan dalam tatanan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Demikian juga Sajogyo (1983) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa menyertakan perempuan dipedesaan dalam proses pembangunan bukanlah berarti hanya sebagai suatu tindakan prikemanusiaan yang adil belaka. Tindakan berupa mengajak, mendorong perempuan di pedesaan dalam pembangunan berarti pula memanfaatkan sumber manusiawi dengan potensi tinggi. Jadi pemberdayaan perempuan sebagai kebijakan pemerintah bertujuan untuk “memampukan” perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara aktif tanpa menghapus peran reproduktif mereka. Pun posisi perempuan dalam konteks keluarga, peran yang ditampilkan oleh perempuan sangat tergantung pada proses interaksi

yang terjadi di lingkungan keluarga yang merupakan kelompok primer. Hingga perempuan tidak saja bekerja di sektor domestik, melainkan dapat menerima program pemberdayaan.

Mengacu pada deskripsi diatas, program pemberdayaan perempuan pada Kelompok Kawasan Pangan Rumah Lestari (KPRL) di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka tentang “Pembuatan Beras Aruk” merupakan jenis usaha yang dapat dijadikan wadah dalam upaya peningkatan peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Namun mengingat masih belum optimalnya baik pada tataran perencanaan, operasionalisasi, fasilitas, *brand*, *packaging* dan strategi pemasaran yang masih sangat tradisional (baca : konvensional) dalam memproduksi beras aruk maupun produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan secara komprehensif melalui pendampingan, motivasi dan diskusi serta pelatihan yang *massif* diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan motivasi kelompok usaha wanita tersebut. Upaya memaksimalkan *core product* lokal berupa pembuatan beras aruk harus terus digalakkan. Sehingga produk ini dapat memberikan referensi dan kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah umumnya bahwa ada produk alternatif selain beras (baca: padi) yaitu “beras aruk” yang berbahan dasar ubi.

Kajian ini menjadi sangat urgen untuk ditelaah lebih jauh sehingga dapat ditemukan pola pemberdayaan bagi perempuan di pedesaan sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga. Selanjutnya bagi pemerintah daerah seharusnya dapat melakukan pendampingan sehingga para kelompok kerja perempuan ini bisa mandiri dan profesional.

B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Menurut Pinky Saptandari (1999), terdapat lima tingkat pemerataan dalam kerangka pemberdayaan perempuan. *Pertama*, pemerataan tingkat kesejahteraan. Jika pada awalnya kelompok ini ingin diberdayakan tetapi tidak punya akses terhadap ekonomi; tidak memiliki peluang dalam upaya meningkatkan skillnya dalam perekonomian; tidak sejahtera, maka perlu motivasi agar mereka bisa “berdaya”. *Kedua*, pemerataan akses, yaitu meningkatkan kemampuan mereka masuk ke sektor-sektor untuk mendapatkan informasi; mendapatkan kesempatan bekerja; mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik dan sama kedudukannya dengan kaum laki-laki. Kalau akses itu sudah diperoleh, maka langkah yang berikutnya adalah meningkatkan kesadaran.

Ketiga, pemerataan kesadaran. Jika kesadaran itu muncul, maka diharapkan mereka itu bisa memperbaiki sendiri apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari jender perempuan ini. Setelah penyadaran diperoleh, maka tingkat yang berikutnya adalah

peningkatan atau pemerataan partisipasi aktif. *Keempat*, pemerataan partisipasi. Perempuan tidak lagi dianggap sebagai sasaran atau objek dari pembangunan, tetapi ikut serta melakukan perencanaan, ikut serta melaksanakan dan ikut serta mengevaluasi program-program yang ditimpakan padanya. *Kelima*, pemerataan penguasaan, di mana partisipasi perempuan pada tingkat keputusan ini tentunya akan memberikan dampak pada pemberdayaan dan apabila partisipasi ini digunakan maka akses mereka terhadap sumber-sumber ekonomi akan menjadi lebih baik serta menjamin pemerataan terhadap akses sumber dan pembagian manfaat. Kontrol atau penguasaan perempuan terhadap pengambilan keputusan ini seringkali mengalami hambatan bukan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakmampuan perempuan itu mengambil keputusan, tetapi hegemoni budaya seringkali menempatkan perempuan bukan sebagai pengambil keputusan. Ini dibuktikan pada AKI (Angka Kematian Ibu) Indonesia yang paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Tingginya angka kematian ibu ini bukan disebabkan oleh kurangnya fasilitas kesehatan (kurangnya kesadaran mereka tentang perlunya memeriksakan diri), tetapi masalah kontrol atau masalah pengambilan keputusan.

Selanjutnya pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, dan kontrol perempuan dan laki-laki di semua bidang pembangunan. Program-program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selama ini merupakan upaya untuk senantiasa mewujudkan terciptanya dan terdistribusinya manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara berimbang. Berbagai langkah dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan gender, antara lain dengan mengembangkan kewirausahaan keluarga sehingga dapat terwujud peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan perekonomian keluarga demi mencapai kesejahteraan keluarga. Meskipun upaya membangun kesetaraan gender tersebut telah dilakukan cukup lama, namun masih terdapat sisi kehidupan yang belum mencerminkan adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kurangnya perhatian dan intensitas serta kesinambungan program pemberdayaan perempuan merupakan salah satu penyebab belum terciptanya kesetaraan gender. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih giat, intensif, sungguh-sungguh, dan berkesinambungan untuk membangun kesetaraan gender melalui program-program pemberdayaan perempuan. Sampai saat ini banyak keluarga miskin yang dengan sendirinya mencerminkan banyaknya perempuan miskin. Sementara itu program-program untuk

memberdayakan perempuan miskin untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masih sangat terbatas.

Pendekatan pembangunan selama ini belum mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki sehingga turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2001). Oleh karena itu di berbagai bidang masih senantiasa diperlukan upaya pemberdayaan perempuan agar terwujud kesetaraan akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota masyarakat. Di lain pihak, pada saat ini masih banyak kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang belum peka gender, yaitu belum mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi dan kepentingan antara laki-laki dan perempuan serta belum menetapkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai sasaran akhir dari pembangunan (Kwik Kian Gie, 2001). Untuk memperkecil kesenjangan tersebut maka kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan haruslah peka gender. Pemerintah melalui Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 menegaskan agar setiap daerah mengembangkan kebijakan-kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Lebih lanjut Sara H. Longwee mengembangkan teknik analisis gender yang dikenal dengan "Kerangka Pemampuan Perempuan". Metode Sara H. Longwee mendasarkan pada pentingnya pembangunan bagi perempuan, bagaimana menangani isu gender sebagai kendala pemberdayaan perempuan dalam upaya memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan upaya mencapai kesetaraan gender (Muttalib, 1993). Pemberdayaan perempuan mencakup tiga hal: (1) *capacity building* bermakna membangun kemampuan perempuan; (2) *cultural change* yaitu perubahan budaya yang memihak kepada perempuan; (3) *struktural adjustment* adalah penyesuaian struktural yang memihak perempuan. Upaya pemberdayaan diarahkan pada tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui kesetaraan gender. Kriteria analisis yang digunakan dalam metode ini terdiri atas 5 (lima) kriteria, yaitu: (1) kesejahteraan; (2) akses; (3) kesadaran; (4) partisipasi; (5) kontrol. Dimensi kesejahteraan secara sederhana dapat diukur dengan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, perumahan, sejauh mana dinikmati oleh perempuan dan laki-laki.

Dimensi akses dan kontrol terhadap sumberdaya menunjuk pada sejauh mana laki-laki dan perempuan berpeluang dan mampu mengambil keputusan atas sumberdaya produksi, sejauhmana laki-laki dan perempuan memiliki akses dan kontrol atas sumberdaya seperti tanah, tenaga kerja, kredit, informasi dan ketrampilan. Adanya kesenjangan antara

perempuan dan laki-laki dalam sumberdaya mengakibatkan produktivitas perempuan dan laki-laki berbeda. Dimensi penyadaran atau kesadaran kritis ditekankan pada perlunya upaya penyadaran kritis bahwa kesenjangan gender terjadi karena faktor sosial budaya dan sifatnya bisa dirubah. Kesenjangan terjadi karena adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Penyadaran berarti penumbuhan sikap kritis. Dimensi berikutnya adalah partisipasi. Dalam pembangunan, kesenjangan gender dalam partisipasi ditunjukkan oleh tidak terwakilinya kelas bawah dalam lembaga-lembaga yang terkesan elit. Upaya pemberdayaan diarahkan pada upaya pengorganisasian perempuan sehingga berperan dalam proses pengambilan keputusan dan kepentingan mereka terwakili. Dimensi berikutnya adalah kontrol, yang melihat kesenjangan gender pada alokasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di segala bidang. Siapa menguasai alat-alat kerja, tenaga kerja, pembentukan modal, dan lain-lain. Idealnya pemberdayaan diarahkan pada alokasi kekuasaan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

C. URGENSI DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DI PEDESAAN

Menurut Sennet & Cabb (1972) dan Conway (1979), ketidakberdayaan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional. *Empowerment* diartikan sebagai pemberian atau peningkatan kekuasaan (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*disadvantage*). Jim Ife (1955) menyatakan, pemberdayaan menunjuk pada usaha realokasi kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Swift dan Levin (1987) menyatakan, pemberdayaan adalah suatu cara sehingga rakyat, organisasi, dan komunitas dapat di arahkan agar mampu menguasai kehidupannya.

Dalam literatur pelayanan kemanusiaan (*human services*), definisi pemberdayaan memiliki beberapa dimensi, yaitu; 1. Proses pengembangan yang dimulai dengan pertumbuhan individual dan puncaknya adalah perubahan sosial yang lebih besar. 2. Suatu keadaan psikologis yang ditandai oleh adanya peningkatan perasaan *self-esteem*, *efficacy*, dan kontrol. 3. Pembebasan yang dihasilkan oleh gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi ketidakberdayaan masyarakat, kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari ketidakberdayaan untuk memperoleh kekuasaan dan merubah struktur yang masih opresif.

Sedang pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dan dicapai melalui penerapan strategi pemberdayaan.

Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu; 1. Pendekatan mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, *stress managemet*, intervensi krisis. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*). 2. Pendekatan mezzo. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 3. Pendekatan makro. Pendekatan ini disebut strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas seperti perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobi, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, merupakan beberapa strategi dalam pendekatan ini.

Selanjutnya pemberdayaan perempuan menurut Hubeis (2010) merupakan kebijakan pemerintah untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara aktif tanpa menghapus peran reproduksi mereka. Menurut Suharto (2010), pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, program pemberdayaan yang dilaksanakan tentu diharapkan dapat mengubah peran perempuan baik di dalam keluarganya maupun di lingkungan sosial.

Menurut pendekatan *Women in Development* (pendekatan perempuan dalam pembangunan) yang diperkenalkan oleh *United States Agency for International Development* (Moser 1989) dalam Sihite (2007), pemberdayaan perempuan memiliki anggapan bahwa perempuan merupakan sumber daya yang belum dimanfaatkan padahal memberikan sumbangan ekonomi dalam pembangunan. Pandangan ini dampaknya besar karena menjadi awal upaya mempopulerkan proyek peningkatan penghasilan bagi perempuan, maka perlu diketahui bagaimana keberhasilan program P2WKSS dalam meningkatkan peran perempuan dan kontribusinya dalam perekonomian keluarga? Sejalan dengan hal tersebut, Hubeis (2010) menyatakan bahwa peran perempuan dalam dukungan dan kesempatan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan sangat strategis dalam memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, penyediaan kesempatan

kerja kepada perempuan memiliki nilai tambah dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Selain sektor pekerjaan formal, sektor pekerjaan informal yang dapat diciptakan oleh program pemberdayaan juga bermanfaat bagi perempuan. Maka setelah adanya program pemberdayaan untuk perempuan, perlu diketahui mengenai bagaimana tingkat pendapatan perempuan dan kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga.

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata '*power*' berarti kekuasaan atau keberdayaan. Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kemudian, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Parsons et al. (1994) menjelaskan ada tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada: (1) sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi perubahan sosial yang lebih besar. (2) sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain. (3) pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi kaum lemah dan kemudian melibatkan upaya kolektif dari kaum lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur yang masih menekan. (Suharto, 2010)

Hal ini dipertegas oleh Ratnawati (2011) pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras (*hard working*), kemandirian (*self-reliance*), hemat (*efficiency*), keterbukaan (*open mind*), sikap tanggung jawab (*responsible*), adalah merupakan bagian pokok dari pemberdayaan ini. Selain itu, tujuan dari pemberdayaan adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Selain itu disebutkan pula penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan mutlak dilakukan. Pemungkinan merupakan upaya untuk menciptakan suasana atau iklim memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Penguatan yaitu dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah. Perlindungan untuk melindungi masyarakat dari penindasan kelompok kuat. Penyokongan dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya, serta pemeliharaan situasi kondusif

agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat. (Suharto 2010)

Jadi pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Ismawan (2003) yang dikutip Baroroh (2009) menyebutkan terdapat 5 (lima) program pengembangan yang dapat disusun untuk mendorong keberhasilan penyelenggaraan kelompok swadaya yang disalurkan melalui tenaga-tenaga pendamping kelompok, yaitu (1) Program pemberdayaan sumberdaya manusia yang meliputi berbagai kegiatan pendidikan dan latihan untuk anggota maupun untuk pengurus yang mencakup pendidikan dan latihan. (2) Program pengembangan kelembagaan kelompok dengan membantu menyusun peraturan-peraturan. (3) Program pemupukan modal swadaya dengan membangun sosial dan kredit anggota dengan menghubungkan masyarakat dengan lembaga keuangan. (4) Program pengembangan usaha, dan (5) Program penyediaan informasi tepat guna.

Pemberdayaan (*empowerment*) perempuan merupakan upaya penguatan terhadap ketidakberdayaan mereka agar mampu menolong diri sendiri, mandiri, serta mengembangkan *self reliance*nya. Pemberdayaan perempuan merupakan proses transformasi yang lebih aplikatif untuk menangkap berbagai perubahan alokasi sumber-sumber ekonomi, distribusi manfaat, dan akumulasi untuk meningkatkan produksi dan pendapatan rumah tangga. Partisipasi perempuan menjadi faktor yang penting dalam sebuah program pemberdayaan, di mana perempuan ikut merumuskan sendiri program atau kegiatan apa yang tepat yang harus mereka lakukan, bagaimana proses pelaksanaannya, melaksanakan kegiatan sendiri sesuai dengan peraturan yang mereka buat, serta ikut melakukan evaluasi tentang apa yang mereka lakukan (Pratama 2013).

Mosse (2002) menuturkan bahwa ibu rumah tangga di seluruh dunia melakukan bermacam tugas yang memiliki kesamaan. Yaitu, mata rantai rumah dengan penghuninya. Selain itu, mereka ikut memberi sedikit penghasilan bagi keluarga dengan upah yang rendah. Dapat disimpulkan bahwa, meskipun perempuan memiliki usaha keras dalam mendapatkan pekerjaan dan upah, mereka hanya mendapat bayaran yang rendah. Pekerjaan rumah sudah menghabiskan waktu perempuan sebanyak 12-16 jam dalam satu hari. Penelitian Suman (2007) menyebutkan bahwa kaum perempuan memiliki tanggung jawab pekerjaan domestik yang lebih besar dibanding kaum laki-laki. Perasaan bertanggung jawab ini membuat mereka merasa mahal untuk berlama-lama meninggalkan rumahnya. Sampai

saat ini masih banyak anggapan masyarakat bahwa peran reproduktif merupakan peran kewajiban perempuan. Namun, pada saat yang sama perempuan dituntut untuk memiliki peran produktif dan sosial pula. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa peran perempuan dalam pembangunan dianggap penting. Pasca keikutsertaan negara Indonesia dalam *Millenium Developmental Goals* yang salah satu poinnya mencetuskan kesetaraan gender, Indonesia mulai menggalakkan program guna memberdayakan perempuan.

D. HASIL KAJIAN; PEMBUATAN BERAS ARUK “KELOMPOK KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI“ (KPRL) DI DESA KEMUJA

1. Pola *Economic Empowerment Perempuan*

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) menjadi isu utama dalam program dan orientasi pembangunan nasional dewasa ini. Munculnya model pembangunan yang berbasis komunitas ini tidak hanya didasarkan pada pengalaman kegagalan strategi dan kebijakan pembangunan nasional pada masa lalu, tetapi juga pengalaman negara-negara maju yang kemudian mendorong terjadinya reorientasi dan perubahan paradigma pembangunan dari ekonomi sebagai sentral (*capital centered development*) kepada manusia sebagai pusat utama pembangunan (*people centered development*). Dewasa ini, telah banyak para ahli pembangunan masyarakat pedesaan yang mengangkat permasalahan ini ke permukaan. Karena sesungguhnya yang terjadi petani tetap miskin, sebab persoalan yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas sumber daya manusia, modal, dan kebijakan tetap sama dari tahun ke tahun walaupun bentuknya berbeda. Studi mengenai kemiskinan pedesaan oleh Sarman dan Sajogyo (2000) menunjukkan bahwa untuk daerah pedesaan di Sulteng mencapai 48,08% sementara untuk perkotaan sekitar 12,24%. Studi ini menggunakan pendekatan jism (kajian bersama) sehingga kriteria kemiskinan sangat lokalistik berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan kepemilikan masyarakat. Banyak proyek/program pemerintah yang sudah dilakukan untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan. Proyek/program tersebut dilakukan masing-masing departemen maupun antar departemen. Pada umumnya proyek-proyek yang digulirkan masih pada generasi pemberian bantuan fisik kepada masyarakat. Baik berupa sarana irigasi, bantuan saprotan, mesin pompa, pembangunan sarana air bersih dan sebagainya. Kenyataannya, ketika proyek berakhir maka keluaran proyek tersebut sudah tidak berfungsi atau bahkan hilang.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan proyek tersebut antara lain, yaitu: (1) ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan (2) paket proyek tidak dilengkapi dengan ketrampilan yang mendukung (3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana (4) tidak ada kelembagaan di tingkat masyarakat yang melanjutkan proyek. Belajar dari berbagai kegagalan tersebut, generasi selanjutnya proyek-proyek mulai dilengkapi dengan aspek lain seperti pelatihan untuk ketrampilan, pembentukan kelembagaan di tingkat masyarakat, keberadaan petugas lapang, melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Atau dengan kata lain beberapa proyek dikelola dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, hasil proyek lebih lama dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan berkembang memberikan dampak positif. Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan. Kajian ini terkait peran pemberdayaan masyarakat desa dalam program-program pemerintah untuk peningkatan pendapatan dan diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat desa mendukung perekonomian nasional. Topik tersebut masih relevan untuk dibahas bagi agenda pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, mengingat keberadaan masyarakat desa dari sisi kualitas dan kuantitas menjadi peluang dan tantangan.

Indonesia sebagai negara yang kaya budaya daerah ternyata juga memiliki kekayaan kearifan lokal bidang pertanian dan pengolahan bahan makanan. Berbagai kearifan lokal ini perlu digali kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini untuk mengatasi krisis pangan yang tengah melanda Indonesia. Djanuderajat (2010) berpendapat bahwa kearifan lokal merupakan bagian dari sistem adaptasi masyarakat terhadap lingkungannya, sehingga masyarakat telah mengetahui dengan baik kondisi alam dan lingkungannya sendiri.

Selain hal tersebut ketahanan pangan di Indonesia juga dipengaruhi oleh kebiasaan makan beras pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Kebiasaan makan beras melunturkan tradisi makan bahan pangan lokal yang dimiliki berbagai suku bangsa dan kelompok sosial. Padahal di masa lalu, berbagai suku bangsa dan kelompok sosial mempunyai beragam makanan pokok berbahan pangan lokal seperti sagu, ubi-ubian, maupun jagung. Hal ini menunjukkan sudah berkembangnya diversifikasi pangan berdasarkan kondisi geografis. Akan tetapi, diversifikasi pangan secara tradisional ini

tergeser oleh kebiasaan makan beras sehingga diversifikasi tereduksi menjadi keseragaman bahan pangan. (Eko Murdiyanto, 2010)

2. Mekanisme Pembuatan Beras Aruk

Ubi kayu merupakan salah satu pangan sumber karbohidrat pengganti beras karena memiliki kandungan gizi yang mendekati beras tetapi pemanfaatannya secara komersial masih belum banyak dilakukan. Konsumsi ubi kayu sebagai pangan alternatif cukup penting dalam mewujudkan penganekaragaman pangan karena ketersediaannya cukup banyak dan mudah dibudidayakan pada lahan subur maupun kurang subur sampai lahan marjinal. Ubi kayu dapat langsung dikonsumsi dengan terlebih dahulu direbus, digoreng dan dibakar atau difermentasi menjadi tape. Untuk membuat ubi kayu menjadi aneka makanan jajanan/kudapan, ubi kayu harus dibuat tepung atau tepung pati (tapioka) terlebih dahulu. Saat ini tengah berkembang teknologi pemanfaatan tepung singkong dengan istilah *Modified Cassava Flour* (Mocaf). Mocaf merupakan produk turunan dari ubi kayu yang baik untuk diolah menjadi berbagai jenis pangan mie, snack, kue dan jenis makanan lain yang bisa dibuat dari tepung terigu maupun tepung beras. Penggunaan mocaf sebagai novel food ingredient (bahan pangan baru) pada industri pangan dapat meningkatkan efisiensi usaha dan ketahanan pangan nasional. Nilai nutrisi mocaf diantaranya adalah komponen karbohidrat yang tinggi (88%) sebagai sumber energi, berserat tinggi (2,5%), tidak mengandung gluten, protein 1%, lemak 0,5%, abu 1% dan air 7% (Parwiyanti, Rindit Pambayun, 2015)

Masyarakat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada umumnya telah mengonsumsi berbagai macam bahan pangan pokok sumber karbohidrat selain beras, namun pola konsumsi yang dilakukan masih memosisikan keragaman bahan pangan pokok sumber karbohidrat tersebut dalam bentuk berbagai olahan yang tidak atau belum diposisikan sebagai bahan pangan pokok. Berdasarkan hasil penelitian Ariningsih (2004), dari segi pemanfaatan sumberdaya dapat disampaikan bahwa masih terjadi tumpang tindih fungsi dalam hal pemanfaatan sumberdaya pangan. Definisi makan masih didominasi oleh makan nasi dengan lauk pauk. Pada saat mengonsumsi bahan pangan sumber karbohidrat lainnya, seperti ubikayu, ubi jalar, ataupun jagung dalam bentuk penganan atau camilan, masih diposisikan belum makan. Padahal fungsi energi yang dibentuk oleh karbohidrat yang terkandung di dalam bahan pangan tersebut tetap terbentuk sebagaimana bahan pangan lain sebagai sumber karbohidrat. Pemanfaatan komoditas bahan pangan sumber

karbohidrat yang dikenal banyak oleh masyarakat Bengkulu dan tingkat produksinya kontinyu, yaitu beras, jagung, ubikayu, dan ubi jalar sebagai bahan makanan pokok sudah lama dikenal oleh beberapa etnis di Indonesia. Sebagai contoh adalah masyarakat Madura mengenal adanya nasi jagung, masyarakat Bangka Belitung mengenal adanya aruk (beras ubikayu), masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta mengenal adanya nasi thiwul, dan lain sebagainya.

Dari diskursus tersebut, maka pola konsumsi pangan pokok yang dibatasi oleh tingginya harga dan rendahnya produksi beras sehingga harus impor perlu masyarakat Bangka Belitung pada umumnya telah mengonsumsi berbagai macam bahan pangan pokok sumber karbohidrat selain beras, namun pola konsumsi yang dilakukan masih memosisikan keragaman bahan pangan pokok sumber karbohidrat tersebut dalam bentuk berbagai olahan yang tidak atau belum diposisikan sebagai bahan pangan pokok.

Lebih jauh untuk mengkaji potret Propinsi Bangka Belitung dalam menggambarkan seberapa besar penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah, dapat dilihat dengan pendekatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Pada tahun 2014, tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 65,45%. Artinya, dari 100 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, terdapat 66 orang termasuk dalam angkatan kerja atau sebanyak 66 orang aktif secara ekonomi. Apabila dibandingkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan jauh di bawah tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki, yaitu 43,97% berbanding 85,09%. Keadaan ini terdapat di daerah pedesaan ataupun perkotaan. Namun, jika diamati menurut daerah tempat tinggal, nampak tingkat partisipasi angkatan kerja di daerah pedesaan (66,95 %) lebih tinggi dibanding tingkat partisipasi angkatan kerja perkotaan (63,93 %). (Badan Pemberdayaan Perempuan, 2015). Data diatas menunjukkan tingginya partisipasi perempuan pedesaan di Bangka Belitung untuk bekerja, potensi ini menjadi peluang bagi lembaga/kelompok pemberdayaan perempuan untuk melakukan *road map* agar produk pangan lokal bisa dijadikan *home industry* bagi peningkatan ekonomi keluarga. Namun usaha ini harus dibarengi dengan keterampilan dan pelatihan bagi pengembangan bisnis mereka.

Desa Kemuja merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Bangka mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Ada juga yang menyadap karet, menanam lada (sebagai komoditas unggulan di Propinsi Bangka Belitung, terkenal dengan Bangka *white peper* dimancanegara) juga masyarakat menanam padi juga ubi. Beras aruk sebagai salah satu produk lokal yang masih langka terdengar oleh kita, berbahan dasar ubi;

produk ini bisa dijadikan alternatif makanan pokok sebagai pengganti beras. Di Desa Kemuja terdapat masyarakat yang memproduksi dan mengkonsumsi “beras aruk”. (M. Kosim, Wawancara, 14 November 2017). Beras aruk adalah beras yang terbuat dari ubikayu yang direndam selama beberapa hari, dibentuk menjadi butiran (granula), disangrai dan dijemur dibawah sinar matahari. Selain beras aruk bahan, pangan yang berbentuk butiran lainnya yang populer di masyarakat Jawa adalah “oyek”. Produk olahan tersebut memiliki perbedaan dari segi pengolahan. Beras aruk melalui proses penyangraian, sedangkan oyek langsung dikukus. Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (2010), cara mengupas ubi kayu yang benar adalah bagian kulit dikupas dan lendir yang menempel pada ubi dihilangkan untuk mengurangi kadar asam sianida (HCN). Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penelitian tentang pembuatan beras aruk dengan variasi pengupasan dan lama perendaman berbeda, dengan harapan akan didapat beras aruk yang lebih baik.

Secara detil pembuatan beras aruk dilakukan dengan cara ubi kayu dibersihkan dari tanah ataupun kotoran yang menempel, lalu dikupas (sesuai perlakuan), dipotong 7-8 cm dan direndam (sesuai perlakuan), air rendaman diganti satu kali sehari. Ubi kayu yang telah direndam, diperas dan dilumatkan untuk menghilangkan air sisa rendaman, dicuci dengan air bersih dan bagian empulurnya dibuang, selanjutnya disaring dengan menggunakan kain. Ubi yang telah lunak, ditumbuk sampai halus dan dipress untuk mengeluarkan sisa air. Selanjutnya dibentuk (pemberasan) dengan cara menggosokkan umbi pada alat penirisan hingga terbentuk granula menyerupai beras. Granula disangrai \pm 15 menit menggunakan kompor gas dengan api sedang hingga granula bersifat burai (tidak lengket) dan warna beras aruk menjadi jernih. Selanjutnya dilakukan pengeringan selama 4 jam dibawah sinar matahari. (Sopiah, KPRL Desa Kemuja, Wawancara, 15 November 2017). Selanjutnya jika sudah berbentuk beras, maka dapat diolah dengan berbagai variasi seperti nasi dan berbagai jenis kue. Upaya pembuatan beras aruk di desa Kemuja ini merupakan langkah nyata dalam mendorong, memperkuat dan menopang perekonomian masyarakat di pedesaan. Kegiatan ini secara empiris dan signifikan diharapkan berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga; mengingat mayoritas perempuan yang tergabung dalam KPRL tersebut.

E. KESIMPULAN

Pemberdayaan perempuan dan peningkatan ekonomi keluarga merupakan sebuah keniscayaan, mengingat semakin maju dan dinamisnya zaman menyebabkan para perempuan harus turut berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan. Termasuk berperan

dalam menopang ekonomi keluarga seperti pembuatan beras aruk. Eksistensi kelompok masyarakat perempuan yang *concern* dalam mengembangkan produk pangan lokal di Desa Kemuja seyogyanya diberdayakan secara optimal, mengingat dengan bahan dasar pokok ubi kayu harus didukung oleh berbagai fasilitas teknologi yang memadai.

Lebih lanjut ragam bahan pangan sumber karbohidrat yang memiliki potensi pengembangan baik, seperti ubi kayu, mengingat bahan pangan pokok tersebut memiliki kemampuan penciptaan keuntungan usaha yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan padi sawah sebagai tanaman pangan sumber karbohidrat. Idealnya disusun strategi pengembangan produk beras aruk dengan 1) peningkatan jumlah produksi dan kualitas yang juga diikuti perbaikan subsistem pengolahan, akses jaringan pasar, dan pemberdayaan lembaga penunjang; (2) digiatkan pelatihan dan penyuluhan kepada kelompok usaha secara terstruktur guna mengakselerasikan transformasi teknologi dan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan pengembangan pertanian yang sedang digalakkan; (3) penguatan posisi tawar kelompok usaha ini melalui peningkatan akses informasi dan jaminan pasar; dan (4) pembangunan infrastruktur guna meningkatkan produktivitas dan optimalisasi kelembagaan ekonomi/koperasi sehingga produksi usaha ini bisa maju dan berkembang.

Selanjutnya, bagi masyarakat umum dan seluruh pihak yang *concern* pada pengembangan ketahanan pangan berdasarkan potensi sumberdaya pertanian lokal seperti Beras Aruk produksinya agar lebih ditingkatkan. Namun memerlukan diversifikasi pengolahan agar “laku” dan menjadi alternatif pengganti padi (beras) bagi masyarakat. Di Propinsi Bangka Belitung khususnya Desa Kemuja Kec. Mendo Barat sebagai sentra pembuatan Beras Aruk seyogyanya pemerintah daerah mampu menyediakan berbagai fasilitas, baik dari ketersediaan bahan baku, pengolahan, pengemasan dan pemasarannya. Hal yang terpenting juga agar ada tata kelola manajemen yang professional dalam kelompok usaha tersebut; misalnya dengan memfasilitasi pelatihan bagi masyarakat perempuan dalam kelompok usaha tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Munandar, Aris. *Peran Negara dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Kajian Politik, dan Masalah Pembangunan. Volume 4/No.1/2008

- Ariani, M & Ashari. *Arab, Kendala, dan Pentingnya Diversifikasi Pangan di Indonesia*. Forum Agro Ekonomi 21(2). 2003
- Ariningsih, Ening. *Analisis Perilaku Konsumsi Pangan Sumber Protein Hewani dan Nabati Pada Masa Krisis Ekonomi di Jawa*. ICASERD Working Paper No.56. 2004
- Puslitbang Sosektan. Balitbangtan. Deptan. <http://www.pse.litbang.deptan.go.id>. Diakses tanggal 10 November 2017.
- Berger, O.L. & Nienehaus R.J.. *To Empower People*. Washington DC: American Enterprise Institute for Public Policy Research. 1977
- Murdiyanto, Eko. *Reaktualisasi Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal menuju Ketahanan Pangan Nasional*. Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta. Seminar Nasional Ketahanan Pangan dan Energi. 2 Desember 2010
- Gardono, Iwan.. "*Negara, Masyarakat, dan Keadilan Sosial*". (Makalah Seminar Memperingati 25 Tahun FISIP Universitas Indonesia, Jakarta 26-27 Januari 1993). Jakarta. 1993
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan. *Laki-laki dan Perempuan Memang Beda, Tetapi Tidak Untuk Dibeda-bedakan*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. 2001
- Gie, Kwik Kian. *Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 yang Berwawasan Gender*, Makalah pada Rakernas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan. Jakarta: BAPPENAS. 2001
- Kosim, M. Kepala Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat. Kabupaten Bangka. *Wawancara*. Tahun 2017
- Saptandari, Pinky. "*Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan*," Masyarakat Kebudayaan dan Politik. Th XII. No 2. April 1999
- Parwiyanti, Rindit Pambayun, Charles. (2015). *Sifat Fisika-Kimia dan Organoleptik "Beras Aruk" Pada Metode Pengupasan dan Periode Perendaman yang Berbeda*, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya
- Sajogyo. (1982). *Bunga Rampai Perekonomian Desa*, Yayasan Obor Indonesia
- Marwanti, Sri, Ismi Dwi Astuti. *Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karang Anyar*, *SEPA* : Vol. 9 No.1 September 2012
- Mukhtar, Sarman dan Sajogyo. *Masalah Penanggulangan Kemiskinan Refleksi dari Kawasan Timur Indonesia*. Puspa Swara. 2000
- Suharto, Edi. *Pembangunan, Kebijakan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS, Bandung. 1997

Sopiah, Ketua Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari, *Wawancara*, Desa Kemuja,
Tahun 2017